

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Annisa Fitriani*, Mahmudi

Fakultas Bisnis dan Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Alamat Email koresponden: 23919005@students.uii.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 120 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulungan yang bekerja di bagian akuntansi/keuangan. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 26.0. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil wawancara yang menunjukkan ketiga variable tersebut sangat mendukung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengujian hipotesis menunjukkan (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, (2) Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan (3) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Keywords: Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan SKAD dan SPI, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Suatu negara pasti mempunyai suatu pemerintah yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Salah satunya ialah Organisasi sektor publik yaitu organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik. Menurut Mahsun (2019) Area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Ichsan et al (2013) menjelaskan bahwa Organisasi sektor publik yang sering dianggap identik dengan pemerintah atau lembaga yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, kebebasan beragama, dan bidang lainnya.

Dalam organisasi sektor publik yaitu Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, patuh terhadap hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini juga harus memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Akan tetapi masih terdapat banyak masalah dalam pelaporan keuangan pemerintah, termasuk ketidaksesuaian data dengan peraturan dan temuan-temuan penyimpangan yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama pemeriksaan laporan keuangan pemerintah. Hal ini telah memicu tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Sebagai hasilnya, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah merasa perlu untuk mengadopsi praktik akuntabilitas dan transparansi guna memenuhi harapan masyarakat (Desiana, 2014).

Sebagai cara untuk menjalankan tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah konkret dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mematuhi prinsip-prinsip ketepatan waktu dan harus dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Setelah laporan keuangan pemerintah tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tersebut juga harus disampaikan kepada DPR/DPRD serta masyarakat umum (Novita, 2013).

Menurut Mifthahul (2019) bahwa Kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan perusahaan atau organisasi baik atau tidaknya. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting sebagai salah satu aspek tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam fenomena terkait kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Bulungan pada tahun 2017 yaitu meliputi anggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Dana Non RKUD yaitu Dana BOS oleh satuan pendidikan/sekolah, serta Dana JKN/Kapitasi oleh Puskesmas dan BLUD menjadi temuan oleh BPK RI atas LKPD kabupaten Bulungan karena tidak menyajikan penggunaan dana Non RKUD secara Wajar. Sehingga perlunya evaluasi lagi mengenai faktor – faktor yang menyebabkan penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan peran penting karena SAKD membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki standar akuntansi yang jelas, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum (Baso et al, 2022). Peran pengawasan juga sangat diperlukan dalam menghasilkan LKPD yang baik yaitu melalui Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Jika lemahnya SPI di lingkup pemerintahan dapat terjadi kelalaian dalam penyajian laporan keuangan daerah. Maka dari itu penerapan SPI penting, Secara keseluruhan juga SPI merupakan bagian integral dari proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan integritas dan kualitas laporan keuangan (Mulyani & Suryawati, 2011).

Selain itu, Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mutu laporan keuangan. Ini mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, sebagai entitas pemerintahan memerlukan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang memadai. Khususnya, pegawai yang bertanggung jawab atas urusan keuangan di Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan untuk merancang laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seharusnya, pemahaman tentang akuntansi adalah dasar yang esensial, karena pengetahuan dan keahlian dalam domain ini menjadi fondasi utama dalam mengelola data akuntansi. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan menyajikan informasi keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Jamaluddin et al, 2020).

Sejumlah studi telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Salah satu di antaranya dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016), yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian internal. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara faktor-faktor lainnya tidak memiliki dampak positif.

Penelitian ini merupakan duplikasi dari Indrayani & Widiastuti (2020), tetapi terdapat perbedaan dalam jenis penelitian sebelumnya, yaitu pada sebelumnya dengan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini yaitu *mix method* merupakan jenis penelitian

campuran data kuantitatif dan kualitatif. Selain itu juga perbedaan variable yaitu penelitian sebelumnya terdapat variable moderasi sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini hanya menggunakan variable independent dan dependen saja. Serta duplikasi juga dari penelitian Nurillah & Muid (2014), terdapat perberbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu perbedaan tempat lokasi penelitian sehingga variable nya juga menyesuaikan karena ada variable yang memang kurang aktif di lokasi penelitian sekarang, dimana Nurillah & Muid (2014) menggunakan empat variable independent kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, sedangkan penelitian saat ini hanya menggunakan tiga variable yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Sumber Daya Manusia. Sehingga memiliki perbedaan juga pada sampel penelitian sekarang. Maka dari itu, secara keseluruhan perbedaan yang terdapat pada variable, jenis penelitian, sampel penelitian, dan lokasi penelitian sehingga penelitian ini layak dilakukan.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih kuat mengenai urgensi dan fenomena masalah yang relevan dengan penelitian tersebut Urgensi Pemilihan Variabel *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)*, *Sistem Pengendalian Internal (SPI)*, dan *Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)* sebagai variabel independen. SAKD: Penting karena merupakan kerangka utama dalam pencatatan keuangan pemerintah daerah. Jika penerapannya tidak optimal, laporan keuangan akan sulit mencapai standar akuntansi yang baik. SPI: SPI merupakan alat untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan dalam pelaporan keuangan. Lemahnya SPI sering menjadi akar masalah rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah. Kompetensi SDM: Kompetensi SDM merupakan elemen kunci karena meskipun sistem akuntansi dan pengendalian internal sudah baik, pelaksana yang tidak kompeten dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan”**.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Stewardship Theory

Menurut Murwaningsari (2009) Teori ini menggambarkan adanya korelasi yang signifikan antara kepuasan dan prestasi organisasi. Teori stewardship didasarkan pada pandangan filosofis tentang sifat manusia yang meyakini bahwa manusia dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan merupakan individu yang memiliki integritas.

Agency Theory

Dalam konteks pemerintahan demokratis, relasi antara pemerintah dan pihak yang memanfaatkan informasi keuangan pemerintah dapat dijelaskan sebagai suatu relasi agensi (Faristina, 2011). Teori Agensi (*Agency Theory*) dalam konteks pemerintahan adalah sebuah kerangka kerja analitis yang digunakan untuk memahami hubungan antara "agen" (biasanya pejabat pemerintah atau birokrat) dan "prinsipal" (biasanya masyarakat atau pemilih) dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik dan penggunaan sumber daya publik. Teori ini secara khusus fokus pada bagaimana agen dapat atau tidak dapat memenuhi kepentingan prinsipal, serta bagaimana masalah agensi dapat diatasi.

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian tindakan yang mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, penggabungan data, dan penyusunan laporan keuangan, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sistem ini dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi computer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Sistem Pengendalian Internal

Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) Sistem Pengendalian Manajemen adalah suatu proses dalam memotivasi dan memberikan inspirasi kepada seseorang dalam sebuah organisasi untuk melakukan aktivitas didalam sebuah organisasi tersebut yang akan dapat mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi sehingga organisasi tersebut berjalan dengan maksimal. Dalam suatu organisasi, pengendalian internal memiliki peran yang krusial karena membantu dalam mengatur dan mengkoordinasikan setiap aktivitas operasional. Terutama dalam konteks pemerintahan, pengendalian ini sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif, semua aktivitas, khususnya dalam bidang keuangan, akan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas yang baik.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah salah satu aset yang ada dalam sebuah organisasi, mencakup semua individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Gomes, 2003). Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan setiap individu di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan tanggung jawab. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi dapat diidentifikasi sebagai individu yang mampu mengelola potensi yang dimilikinya, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang berbeda. Hal ini membantu individu untuk memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada di sekitarnya guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai penyediaan informasi keuangan yang memenuhi kebutuhan para pengguna serta menjaga kepentingan pemiliknya, dengan berlandaskan pada sifat-sifat kualitatif informasi keuangan dan pengungkapan yang lengkap dan tepat. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah, terdapat paragraf 35 yang mengidentifikasi empat karakteristik kualitatif yang harus dimiliki oleh laporan keuangan, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat sifat ini merupakan syarat yang diatur secara normatif yang harus ada agar laporan keuangan pemerintah memenuhi tingkat kualitas yang diharapkan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini dipengaruhi oleh stewardship. SAKD mengatur tentang pengungkapan informasi keuangan yang relevan bagi entitas daerah. Ini sesuai dengan prinsip Stewardship yang mengharapkan manajer untuk mengungkapkan informasi keuangan yang akurat dan lengkap kepada pemilik atau masyarakat sebagai bentuk itikad baik.

Penelitian tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Yuliani & Agustini (2016) pada SKPD Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Murapi (2016) di SKPD Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian tersebut diperoleh bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil.

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SPI merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa fungsi mereka sebagai "steward" atau pengelola dana publik dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Stewardship *Theory* yang mendorong pemerintah untuk bertindak dengan itikad baik dan efisien dalam

penggunaan dana publik. Dan SPI juga merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengelola konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam hubungan antara pemerintah (agen) dan masyarakat atau pemegang kepentingan publik (*principal*), sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajukan dalam *Agency Theory*. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, mengukur sumber daya suatu organisasi, serta memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*fraud*). SPI terdiri atas kebijakan dan prosedur digunakan untuk mencapai sasaran dan terjaminnya laporan keuangan yang andal, serta menjamin dipatuhinya peraturan dan hukum yang berlaku (Pradono & Basukianto, 2015).

Penelitian tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh Pradono & Basukianto (2015) pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan konsistensi hasil.

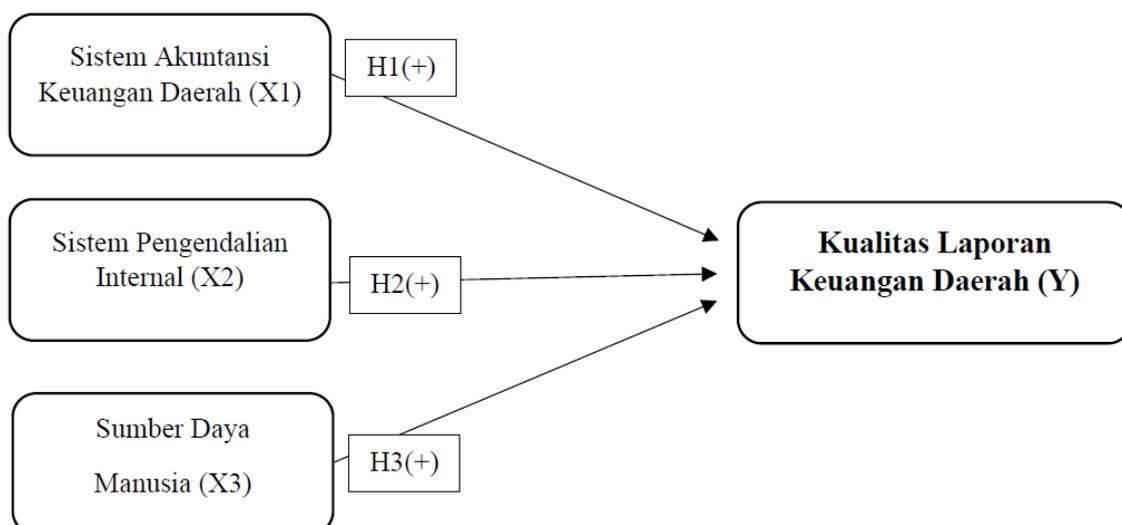
Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam konteks *Stewardship Theory*, kompetensi SDM adalah salah satu elemen kunci yang mendukung pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengelola yang efektif dan bertanggung jawab atas aset dan sumber daya publik. Kemampuan dan pengetahuan yang tepat membantu pemerintah menjalankan peran stewardship mereka dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat dan pemilik sumber daya publik. Dan sesuai pada *Agency theory* kompetensi SDM memainkan peran penting dengan memastikan bahwa agen pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka, bertindak dengan itikad baik, dan dipantau dengan baik oleh prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan publik). Dalam konteks *Stewardship Theory*, kompetensi SDM adalah salah satu elemen kunci yang mendukung pelaksanaan peran pemerintah sebagai pengelola yang efektif dan bertanggung jawab atas aset dan sumber daya publik. Kemampuan dan pengetahuan yang tepat membantu pemerintah menjalankan peran stewardship mereka dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat dan pemilik sumber daya publik. Dan sesuai pada *Agency theory* kompetensi SDM memainkan peran penting dengan memastikan bahwa agen pemerintah memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugas mereka, bertindak dengan itikad baik, dan dipantau dengan baik oleh prinsipal (masyarakat atau pemegang kepentingan publik).

Berdasarkan teori diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



Gambar 1. Kerangka Penelitian

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Mix Methods* (campuran). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Bulungan. Pemilihan SKPD sebagai sampel penelitian karena pemilihan tersebut sesuai dengan judul topik yang peneliti gunakan.

SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Bulungan meliputi 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 6 Badan, dan 30 Dinas. Sedangkan untuk dijadikan sampel penelitian 1 Sekretariat, 1 Inspektorat, 4 Badan, dan 16 Dinas. Berikut daftar SKPD yang dijadikan sampel:

Tabel 1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

No	Nama SKPD
1	Sekretariat SKPD
2	Inspektorat
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
4	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
5	Badan Pendapatan Daerah
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
11	Dinas Ketahanan Pangan
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Persandian
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
16	Dinas Perikanan
17	Dinas Lingkungan Hidup
18	Dinas Sosial
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
21	Dinas Kecamatan Tanjung Selor
22	Dinas Kecamatan Bunyu

Sumber: peneliti, 2023

Pengambilan sampel terhadap responden akan dilakukan secara *purposive sampling*. Sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dapat ditetapkan untuk mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah; 1) pejabat structural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan pada masing-masing SKPD, 2) memiliki masa kerja minimal 1 tahun pada periode penyusunan laporan keuangan daerah.

Dalam pengumpulan data pada jenis penelitian *mix methods* (campuran) yaitu yang terdiri dari; 1) data primer pada penelitian kuantitatif dengan sumber data yang diperoleh berasal dari kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, 2) data wawancara pada penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di SKPD tertentu.

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni: Wawancara dan Kuesioner. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang memiliki keterkaitan melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan di SKPD tertentu, diantaranya: Pejabat structural dan aparat BKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai team penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan Pejabat structural dan aparat Inspektorat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan sebelum diserahkan kepada BPK. Kuesioner disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria pemilihan sampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Hasil pertama yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara kepada Pejabat struktural dan aparat BKAD yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai team penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dan Pejabat structural dan aparat Inspektorat yang melaksanakan fungsi akuntansi/ tata usaha keuangan yaitu sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada BPK secara daring melalui media komunikasi whatsapp.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Subbidang Akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bulungan yang menyampaikan bahwa *“Sesuai dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 90 tahun 2022 tentang sistem akuntansi pemerintah daerah adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel. Itu juga membantu mendukung prinsip-prinsip good governance atau tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintahan daerah kabupaten bulungan. Serta memastikan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di daerah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau instansi terkait, Menilai pemahaman dan komitmen dari pihak-pihak terkait (seperti kepala daerah, anggota dewan, dan pejabat keuangan) terhadap pentingnya sistem pengendalian internal”*.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Inspektur Inspektorat di Kabupaten Bulungan terkait penerapan sistem pengendalian internal pada SKPD yang ada di Kabupaten Bulungan. Penyampaian inspektur bahwa *“Sistem pengendalian internal pada kabupaten bulungan memang masih kurang diperhatikan bagi organisasi maupun individu yaitu masih kurang pada sumber daya manusia yang kurang kompeten, kurang kesadaran dan kurangnya pemahaman teknis. Tetapi dalam praktiknya Inspektorat sudah maksimal dalam menjalankan tugas yaitu pelan-pelan membangun kesadaran individu mengenai pengendalian internal merupakan sesuatu hal yang penting. Serta mendapatkan kesaksian dari pihak terkait tentang keberhasilan implementasi sistem akuntansi baru, termasuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan ketersediaan informasi keuangan secara real-time, dan Memastikan bahwa SDM yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang cukup untuk memahami perubahan regulasi, teknologi, dan prosedur akuntansi”*.

Hasil Kuesioner

Jumlah kuesioner (*gform*) yang dibagikan sebanyak 86 kuesioner, dimana 70 kuesioner kembali dan sebanyak 70 kuesioner yang memenuhi kriteria untuk diolah. Adapun hasil analisis pengujian statistik deskriptif dan analisis penelitian antara lain:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	120	2.00	4.00	28,5667	3,083
Sistem Pengendalian Internal	120	2.00	4.00	17,0583	2,039
Sumber Daya Manusia	120	3.00	4.00	27,2750	3,007
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120	3.00	4.00	38,6917	3,685

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan table 4.6 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki jumlah data sebanyak 120 data. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai minimum pada indikator SAKD2 dan SAKD 5 dengan nilai minimum 2.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 28,5667 dan nilai standar deviasi sebesar 3,08352. Variabel sistem pengendalian intern memiliki nilai minimum pada indikator SPI2 dengan nilai minimum 2.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 17,0583 dan standar deviasi sebesar 2,03868. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai minimum pada indikator SDM2 dengan nilai minimum 3.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 27,2750 dengan standar deviasi sebesar 3,00689. Variabel kualitas laporan keuangan memiliki nilai minimum pada indikator LKPD2 dengan nilai minimum 3.00 dan untuk nilai maksimum yang sama untuk semua indikator yaitu dengan nilai maksimum 4.00. Nilai rata-rata sebesar 38,6917 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,68462.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variable	Indikator	Sig	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	SAKD1	0,000	0,607	0,179	Valid
	SAKD2	0,000	0,724	0,179	Valid
	SAKD3	0,000	0,693	0,179	Valid
	SAKD4	0,000	0,544	0,179	Valid
	SAKD5	0,000	0,831	0,179	Valid
	SAKD6	0,000	0,757	0,179	Valid
	SAKD7	0,000	0,718	0,179	Valid
	SAKD8	0,000	0,645	0,179	Valid
Sistem Pengendalian Internal	SPI1	0,000	0,546	0,179	Valid
	SPI2	0,000	0,614	0,179	Valid
	SPI3	0,000	0,684	0,179	Valid
	SPI4	0,000	0,637	0,179	Valid
	SPI5	0,000	0,524	0,179	Valid
Sumber Daya Manusia	SDM1	0,000	0,639	0,179	Valid
	SDM2	0,000	0,626	0,179	Valid
	SDM3	0,000	0,703	0,179	Valid
	SDM4	0,000	0,667	0,179	Valid
	SDM5	0,000	0,512	0,179	Valid
	SDM6	0,000	0,588	0,179	Valid
	SDM7	0,000	0,630	0,179	Valid
	SDM8	0,000	0,541	0,179	Valid
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LKPD1	0,000	0,670	0,179	Valid
	LKPD2	0,000	0,653	0,179	Valid
	LKPD3	0,000	0,665	0,179	Valid
	LKPD4	0,000	0,602	0,179	Valid
	LKPD5	0,000	0,580	0,179	Valid
	LKPD6	0,000	0,642	0,179	Valid
	LKPD7	0,000	0,645	0,179	Valid
	LKPD8	0,000	0,622	0,179	Valid
	LKPD9	0,000	0,679	0,179	Valid
	LKPD10	0,000	0,629	0,179	Valid
	LKPD11	0,000	0,547	0,179	Valid

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel hasil uji validitas di atas dapat diketahui besaran koefisien korelasi dari seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian. Nilai R tabel dengan $n = 120$ dan tingkat signifikansi 0,05 sebesar 0,179. Dari hasil perhitungan item pertanyaan variabel-variabel penelitian mempunyai nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel artinya seluruh item pertanyaan variabel-variabel penelitian valid dan nilai Sig. $< 0,05$ sehingga dapat digunakan untuk mengukur data penelitian selanjutnya.

Tabel 4. Hasil Reliabilitas

	Cronbach Alpha	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,842	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,609	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,748	Reliabel
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,848	Reliabel

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel penelitian tersebut mendekati 1 atau $> 0,60$. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam variabel-variabel penelitian tersebut adalah reliabel, sehingga dapat digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya.

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38045702
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.050
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

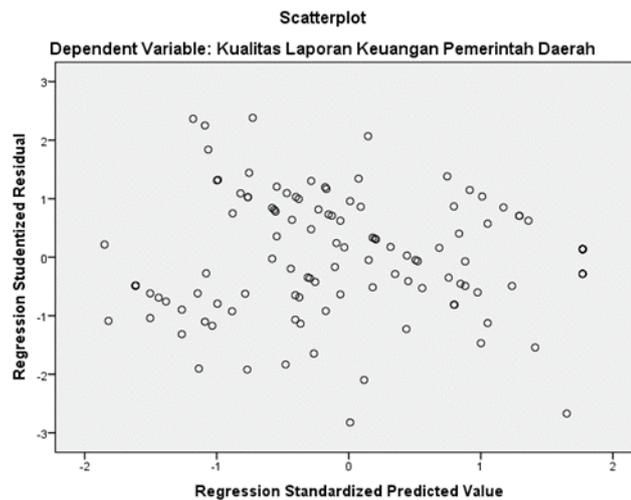
Berdasarkan Uji normalitas menggunakan One Kolmogorov-Smirnof menghasilkan bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Multikolinearitas

	Tolerance	VIF	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,865	1,156	Tidak ada multikolinearitas
Sistem Pengendalian Internal	0,754	1,326	Tidak ada multikolinearitas
Sumber Daya Manusia	0,755	1,324	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel Independen (SKAD, SPI dan SDM) memiliki nilai tolerance $> 0,100$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data karena plot pada scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu seperti titik-titik, membentuk pola yang teratur dan tidak ada pola yang jelas dimana titik-titik berdistribusi di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 6. Hasil Analisis Linear Berganda

	Coefficient	Sig
(Constant)	5,586	0,035
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,493	0,000
Sistem Pengendalian Internal	0,577	0,000
Sumber Daya Manusia	0,337	0,000

Sumber: Data Diolah, 2024

Model regresi yang didapat dari persamaan di atas adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 5,586 + 0,493 X_1 + 0,577 X_2 + 0,337 X_3 + e$$

Dari tabel di atas menunjukkan hasil pengujian dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah & Muid (2014) yang menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kota Depok.

H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari sistem pengendalian intern. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,577 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari

0,05. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H2) dalam penelitian ini **diterima**.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu & Kanita (2023) yang menunjukkan bahwa hasil penelitiannya sistem pengendalian internal manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pada OPD Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Pengujian terhadap hipotesis ini melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan tabel di atas, dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H3) dalam penelitian ini **diterima**.

Hasil ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrayani & Widiastuti (2020) yang melakukan pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan sistem pengendalian internal mempengaruhi Kualitas Laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi pada SKPD Kabupaten Klaten.

Tabel 7. Hasil Uji F

Sig	Keterangan
0,000	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Rsquare	Adjusted R Square
	0,763	0,583	0,572

Sumber: Data Diolah, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai determinasi atau Adjusted R Square sebesar 0,572 yang berarti bahwa 52,7% variasi besarnya variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel penerapan SKAD, penerapan SPI dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan untuk sisanya sebesar 42,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisa data yang diberikan kepada Pegawai pada bagian keuangan di 22 SKPD Kabupaten Bulungan sehingga diperoleh hasil 120 responden selanjutnya dilakukan Analisa dengan metode regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26.0 dapat ditarik kesimpulan yakni penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan karena adanya hasil positif dan signifikan karena dihasilkan koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,493 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan

karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penerapan SKAD berpengaruh terhadap LKPD.

Selanjutnya, hipotesis kedua menunjukkan Penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan yang mendapatkan hasil positif dan signifikan karena koefisien regresi sistem pengendalian intern sebesar 0,577 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Penerapan SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap LKPD.

Hipotesis ketiga menunjukkan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan dengan hasil positif dan signifikan karena koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,337 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$, maka koefisien regresi tersebut dikatakan signifikan karena nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap LKPD.

Sejalan dengan penelitian kuantitatif yang dilakukan, selanjutnya yaitu kesimpulan penelitian kualitatif berasal dari 2 informan yang dapat disimpulkan jika Penerapan SKAD dan SPI serta Kompetensi SDM yang sudah berpengaruh baik terhadap LKPD. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi factor apa saja yang dapat menurunkan atau meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.

Implikasi hasil penelitian ini dapat meningkatkan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal serta Kompetensi Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi informasi factor apa saja yang dapat menurunkan atau meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan.

Ada beberapa keterbatasan yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pada sampel penelitian kualitatif yaitu wawancara hanya mendapatkan informasi pada 2 orang yang bersedia untuk memberikan informasi mengenai Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, sehingga belum efektif dalam pengambilan kesimpulan.
2. Sampel penelitian yang hanya berjumlah 22 SKPD dan lokasi penelitian yang hanya dilakukan di Kabupaten Bulungan, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk lingkup Indonesia.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan variable yaitu hanya meneliti 3 variabel yang berpengaruh terhadap LKPD yaitu variable Penerapan SKAD dan SPI serta Kompetensi SDM, sehingga sulit untuk menentukan kekonsistenan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu.

Dengan memerhatikan beberapa keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya pada metode penelitian mix methods diharapkan memperoleh informan yang setara dengan jumlah penyebaran kuesioner agar kesimpulan yang diambil bisa efektif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lingkup lokasi yang lebih luas dan jumlah sampel penelitian yang lebih luas.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sehingga bisa dapat menambah variable baru untuk penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Anthony, R. dan V. Govindarajan. 2009. Management Control System (Sistem Pengendalian Manajemen). Terjemahan F.X Kurniawan Tjakrawala. Salemba Empat. Jakarta
- Baso, R., Suriyanto, & Asmelisa. (2022). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang. *Journal of Management. Volume 5(3)*. 83-94
- Gomes, F. C. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Andi Offset.

- Ichsan, T., Nugroho, H., & Friya, Y., (2013). Peran Akuntan Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Organisasi Sektor Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 12(1). 65-76
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1–16.
- Jamaluddin, Ismaturrehmi, & Yahya, Z. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Volume 4, No 1, 22-25.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis Peran Dan Fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP/PP No.60 Tahun 2008) Dalam Meminimalisasi Tingkat Salah Saji Pencatatan Akuntansi Keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 7(2), 102–116.
- Murapi, I. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal Infestasi*, 12(2), 131–143.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 11(1), 30-41.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 1–13.
- Pradono, F. C., & Basukianto. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–200.
- Rahayu, S., & Kanita, A. D. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022). *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 423–432.
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 14(1), 56–64.